



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN SOOKO



Jalan Raya Bhayangkara 250 , Sooko , Mojokerto



<https://sooko.mojokertokab.go.id/>



081331980985 / 081234588192

Kata Pengantar

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sooko Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sooko Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Kerja (Renja), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Januari 2026
CAMAT SOOKO

MASLUCHMAN SH.MSi
NIP. 196911191998031005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyusun 2 Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun setelah penetapan periode perencanaan baru 2025-2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis dengan total 1 indikator kinerja dan 1 target kinerja yang harus dicapai, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 4 sasaran strategis dan dengan 4 indikator kinerja dan 4 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	95	95,06	100,1%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%	100%	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5	83,09	101%
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92%	93,24%	101%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	84,7 (Tinggi)	83,06 (Tinggi)	98%
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi	2 Inovasi	100%

2. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	95,00	95,06	100,1%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	82,50	83,09	101%
Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100%
Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Kinerja keuangan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 2.845.794.428,00 atau 93,24% dari total pagu anggaran sebesar Rp 3.052.027.000,00.

Capaian kinerja Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Gambaran Umum	2
I.3 Isu-isu Strategis	4
I.4 Sistematika Penulisan.....	5
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 7
II.1 Penjenjangan Strategis.....	7
II.2 Indikator Kinerja Utama.....	12
II.3 Perjanjian Kinerja.....	15
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 18
III.1 Pengukuran Kinerja	18
III.2 Analisis Kinerja	20
III.3 Prestasi Kinerja Lainnya	28
III.4 Akuntabilitas Anggaran	30
 BAB IV PENUTUP	 32
 LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel II.1 Matriks Penjenjangan Strategis

Tabel II.2 Indikator Kinerja Utama

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel II.4 Anggaran Per Program

Tabel III.1.a Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

Tabel III.1.b Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel III.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan

Tabel III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan SPM

Tabel III.4 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Tabel III.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

Daftar Gambar

Gambar I.1 Peta Wilayah Kecamatan Sooko

Gambar I.2 Struktur Organisasi Kecamatan Sooko

Gambar III.1 Grafik Perbandingan Nilai SAKIP

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Landasan hukum penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah diatur dalam Perpres 29/2014 dan Permenpan RB 53/2014 sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan SAKIP sebagai rangkaian sistematis aktivitas untuk penetapan, pengukuran, pengelolaan data, dan pelaporan kinerja demi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP mencakup pelaporan kinerja sebagai elemen wajib, termasuk laporan interim dan tahunan atas prestasi kerja berdasarkan anggaran yang dialokasikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 memberikan petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan review atas laporan kinerja instansi pemerintah untuk menstandarisasi proses akuntabilitas. Laporan kinerja wajib menyajikan capaian target, analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, efisiensi sumber daya, serta perbandingan dengan standar nasional.

Penyusunan laporan kinerja diwajibkan untuk memastikan transparansi hasil kerja kepada publik, evaluasi objektif melalui review, dan bahan pertanggungjawaban pencapaian misi instansi sesuai RPJMN dan RPJMD. Hal ini mendukung peningkatan kinerja secara bertahap.

Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan dokumen tahunan yang menyajikan pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dokumen ini menggambarkan ikhtisar capaian kinerja berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang dialokasikan, termasuk analisis keberhasilan, kegagalan, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

Proses pembuatan laporan kinerja instansi pemerintah mengikuti tahapan sistematis sesuai petunjuk teknis untuk memastikan akuntabilitas dan kualitas data. Tahapan ini dimulai dari perencanaan hingga review akhir sebelum diserahkan.

Laporan kinerja memiliki hubungan erat dengan dokumen perencanaan sebagai alat evaluasi pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dokumen ini

menjadi umpan balik untuk menyempurnakan siklus perencanaan berikutnya dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan kinerja membandingkan realisasi capaian dengan target dari Renja (Rencana Kerja), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), dan Renstra (Rencana Strategis) untuk mengukur konsistensi dan keselarasan. Perpres 29/2014 dan PermenpanRB 53/2014 mewajibkan integrasi ini agar laporan mencerminkan efektivitas pelaksanaan rencana jangka menengah dan tahunan.

Hasil evaluasi dari laporan kinerja menjadi dasar penyesuaian target dan prioritas pada Renstra, Renja, serta RKPD tahun anggaran berikutnya. Laporan kinerja menyediakan data realisasi capaian dibandingkan target perencanaan sebelumnya, termasuk analisis varians dan efisiensi sumber daya. Informasi ini digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan program, sehingga perencanaan strategis dapat lebih realistis dan terukur.

I.2 Gambaran Umum

Sooko merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa timur, Indonesia. Sooko merupakan sentra industri rumah tangga seperti sepatu, sandal, furniture (*mojokertocraft*), selain itu juga merupakan sentra pertanian dan jasa Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Sooko terdiri dari 15 desa yang terbagi ke 44 dusun, 119 Rukun Warga (RW), 409 Rukun Tetangga (RT). 15 desa yang berada di wilayah kecamatan sooko diantaranya Blimbingsari, Brangkal, Gemekan, Jampirogo, Japan, Karangkedawang, Kedungmaling, Klinterejo, Modongan, Mojaranu, Ngingasrembyong, Sambiroto, Sooko, Tempuran dan Wringinrejo.

Wilayah Kecamatan Sooko berada di ketinggian antara 22 hingga 43 meter di atas permukaan laut, dengan wilayah paling tinggi berada di Desa Blimbingsari dan yang paling rendah di Desa Tempuran. Kecamatan Sooko memiliki luas 24,75 km². Batas batas wilayah kecamatan Sooko sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Gedeg, Kota Mojokerto

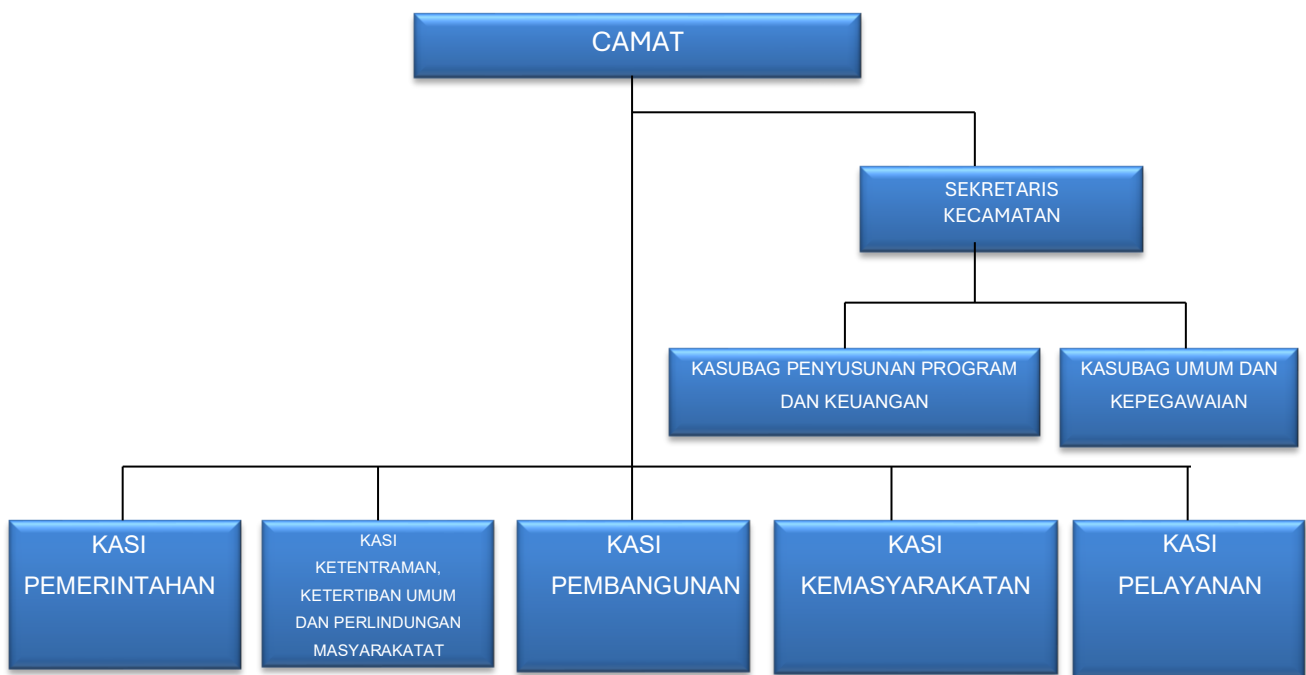
Sebelah Timur : Kecamatan Puri

Sebelah Selatan : Kecamatan Trowulan dan Puri

Sebelah Barat : Kecamatan Trowulan Kabupaten Jombang

Kecamatan Sooko merupakan unit administratif di bawah pemerintah Kabupaten Mojokerto yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan pemerintahan umum, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Struktur organisasinya, sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SOOKO



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Sooko

Susunan organisasi kecamatan mencakup Camat di puncak hierarki. Camat dibantu oleh Sekretariat Kecamatan yang terdiri dari Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan. Struktur organisasi juga meliputi beberapa seksi utama seperti Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Seksi Pembangunan, Seksi Kemasyarakatan dan Seksi Pelayanan.

Aset yang dimiliki meliputi kendaraan dinas, peralatan kerja, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya yang digunakan untuk menunjang kelancaran operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas, Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto didukung oleh fasilitas perkantoran, teknologi informasi serta jaringan komunikasi yang memadai guna meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

I.3 Isu-isu Strategis

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Sooko tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat.

Adanya pertimbangan terkait isu-isu penting ini dilakukan agar selalu ada perbaikan ke depannya sehingga Kecamatan Sooko dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sooko antara lain:

1. Teknologi informasi yang menuntut kesiapan SDM yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program/kegiatan;
2. Kurang maksimalnya pengetahuan masyarakat akan pelayanan yang diberikan (jenis, persyaratan dan prosedur pelayanan);
3. Kurangnya pengawasan berbasis kinerja;
4. Kurang meratanya pembagian kegiatan yang berhubungan langsung maupun yang tidak berhubungan langsung dengan kinerja selaku perangkat daerah hingga berdampak pada kurang maksimalnya peran Kecamatan Sooko terhadap perwujudan pencapaian visi dan misi daerah.

Meningkatkan pelayanan kecamatan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan terkait sumber daya manusia, infrastruktur, dan koordinasi, namun juga membuka peluang melalui inovasi digital dan optimalisasi peran kecamatan. Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan kecamatan adalah sebagai berikut:

- **Tantangan**

Rendahnya kompetensi SDM dalam perencanaan, administrasi keuangan, dan teknologi informasi menghambat pelayanan efektif. Kurangnya koordinasi antar unit kerja, stakeholder, serta infrastruktur terbatas seperti akses geografis sulit menjadi hambatan umum. Pemahaman masyarakat terhadap standar pelayanan masih minim, ditambah beban legitimasi dari kabupaten yang menambah tekanan aparat.

- Peluang

Optimalisasi peran kecamatan melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) memungkinkan pelayanan cepat, transparan, dan satu loket. Inovasi seperti layanan daring dan pelimpahan wewenang dari bupati ke camat dapat meningkatkan kualitas, terutama di wilayah terpencil. Dukungan stakeholder dan kepercayaan masyarakat membuka ruang untuk responsif terhadap dinamika pembangunan.

Isu-isu penting dalam perumusan program dan kegiatan kecamatan diformulasikan dari evaluasi Rencana Kerja sebelumnya, identifikasi permasalahan, serta prediksi tantangan strategis seperti peningkatan pelayanan dan koordinasi. Rekomendasi ini dirancang strategis untuk ditindaklanjuti, selaras dengan Rencana Strategis, dan relevan bagi Kecamatan Sooko. Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Isu dan Rekomendasi Pelayanan

Kurang optimalnya pelayanan administrasi terpadu (PATEN) akibat keterbatasan SDM dan infrastruktur. Rekomendasi: meningkatkan pelatihan aparatur dan fasilitasi standar pelayanan minimal melalui program peningkatan kapasitas kinerja.

2. Isu dan Rekomendasi Koordinasi

Minimnya sinergi antar perangkat daerah, desa, dan stakeholder dalam perencanaan pembangunan. Rekomendasi: Menyelenggarakan rakor rutin Muspika dan pendampingan desa untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

3. Isu dan Rekomendasi Pemberdayaan

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. Rekomendasi: Melakukan pembinaan organisasi masyarakat.

I.4 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Sooko selama tahun 2025. Capaian kinerja tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sooko Tahun 2025 terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya Laporan Kinerja; profil yang meliputi gambaran umum, struktur organisasi, tugas, dan fungsinya; isu-isu strategis; serta sistematika penulisan Laporan Kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja sebagai dasar pelaporan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penjelasan atas capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatannya. Realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini.

BAB IV PENUTUP

Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja serta harapan dan upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Penjenjangan Strategis

Sesuai dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2025, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2021-2025 memiliki 1 visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kabupaten Mojokerto memiliki 4 misi yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan;
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan;
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Kecamatan dengan tugas utama “membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif”, mendukung pencapaian misi ke-3:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya:

Tabel II.1A Matriks Penjenjangan Strategis (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal				IKM Kecamatan	95
	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal			IKM Kecamatan	95
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5
				Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 inovasi
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	90%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	1
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas ASN PD	84,7
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan Administrasi Umum perangkat Daerah sesuai kebutuhan	92%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
		Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar Pelayanan	500 pelayanan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	6 Laporan
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	100%
			Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23 fasilitasi
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2025-2029 memiliki 1 visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah

Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kabupaten Mojokerto memiliki 4 misi yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman masyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Kecamatan dengan tugas utama “membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif”, mendukung pencapaian misi ke-1:

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya:

Tabel II.1.A Matriks Penjenjangan Strategis (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			IKM Kecamatan	95
	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan		IKM Kecamatan	95
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	80%
			Persentase Realisasi Anggaran PD	92, %

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	90%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	80%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN PD	84,7
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	92%
				Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	92%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	85%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan yang Diselenggarakan Sesuai Standar	100%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	100%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	6 Laporan
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	100%
			Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan koordinasi	23 Laporan
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen

II.2 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan perencanaan strategis yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, Kecamatan Sookomemiliki indikator kinerja utama sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya. Indikator kinerja utama tersebut, sebagai berikut:

Tabel II.2.A Indikator Kinerja Utama

(sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1.	Terwujudnya pelayanan public yang optimal	IKM Kecamatan	Nilai	IKM Kecamatan Ket: Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60 Kategori Baik : 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00 Total dari Nilai Persepsi per Unsur ----- ----- x Nilai Penimbang Total Unsur yang Terisi	Laporan Hasil Sukma-E
	Terselenggara nya pelayanan PATEN sesuai standart pelayanan	Persentase pelayanan yang diselenggarakan sesuai standar	Persentase	Jumlah layanan yang terlayani sesuai standar ----- ----- x 100% Jumlah pelayanan yang terlayani	Laporan Hasil Pelayanan
	Terselenggara nya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Persentase	Jumlah dokumen hasil koordinasi yang ditindaklanjuti ----- ----- x 100% Jumlah dokumen hasil koordinasi	Dokumen Hasil Koordinasi
	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	Nilai SAKIP Kecamatan Ket: Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
		Persentase Realisasi Anggaran	Persentase	Jumlah Realisasi Anggaran ----- ----- x 100% Jumlah Pagu Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	IP ASN Kecamatan Ket: Kategori Sangat Rendah : ≤ 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM
	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Jumlah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Laporan Inovasi Kecamatan

Tabel II.2.B Indikator Kinerja Utama (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	Nilai	IKM Kecamatan Ket: Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60 Kategori Baik : 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00 Total dari Nilai Persepsi per Unsur ----- ----- x Nilai Penimbang Total Unsur yang Terisi	Laporan Hasil Sukma-E
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	Nilai SAKIP Kecamatan Ket: Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	Persentase	Jumlah layanan yang terlayani sesuai standar ----- ----- x 100% Jumlah pelayanan yang terlayani	Laporan Hasil Pelayanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Persentase	$\frac{\text{Jumlah dokumen hasil koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah dokumen hasil koordinasi}} \times 100\%$	Dokumen Hasil Koordinasi

II.3 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2024, bahwa perjanjian kinerja dalam setahun akan mengalami perubahan, jika:

- Terjadi perubahan dan mutasi pejabat;
- Perubahan dalam perencanaan strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto disusun dan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah pada bulan Januari dan akan dilakukan perubahan minimal 1 kali dalam setahun dalam rentang waktu maksimal 1 bulan setelah perubahan anggaran/pejabat ditetapkan. Perjanjian Kinerja Camat Sooko Tahun 2025 yang telah mengalami perubahan dan dijadikan sebagai dasar pelaporan kinerja ini, indikatornya sebagai berikut:

Tabel II.3.A Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	95	95,06	100,1%

Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%
Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5	83,09	101%

		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92%	93,24%	101%
		Indeks Profesionalitas ASN	84,7 (Tinggi)	83.06%	98%
Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi	2 Inovasi	82,5

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi anggaran sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025, sebagai berikut:

Tabel II.3.B Anggaran Per Program

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 2.608.281.000
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 23.796.000
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 419.950.000

Tabel II.3.C Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	95	95,06	100,1%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	82,50	83,09	101%
Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi anggaran sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029, sebagai berikut:

Tabel II.3.D Anggaran Per Program

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 2.608.281.000
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 23.796.000
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 419.950.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja Kecamatan Sooko tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator sasaran strategis yang tercantum pada perjanjian kinerja. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator sasaran strategis. Realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan Kecamatan Sooko Tahun 2025. Terdapat 2 Perjanjian Kinerja yang terealisasi sebagaimana pada tabel berikut ini :

Pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 sebagai berikut :

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;

Tabel III.1.a Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	95	95,06	100,1%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%	100%	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5	83,09	101%
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92%	93,24%	101%

	Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.3	Indeks Profesionalitas ASN	84,7 (Tinggi)	83,06	98%
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 inovasi	2 inovasi	100%

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;

Tabel III.1.b Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi 2025	Capaian
				I	II	III	IV		
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	95	0	0	0	96,09	96,09	101%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	82,5	0	0	83,09	0	83,09	101%
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	25%	50%	75%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	25%	50%	75%	100%	100%	100%

III.2 Analisis Kinerja

Di tahun 2025, Kecamatan Sooko memiliki 2 Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja dan 4 kinerja lainnya dengan 6 indikator kinerja. Formulasi perhitungan seluruh sasaran strategis dengan indikator kinerja dan seluruh kinerja lainnya dengan indikator kinerja periode tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	Nilai	IKM Kecamatan Ket: Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60 Kategori Baik : 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00 Total dari Nilai Persepsi per Unsur ----- ---- x Nilai Penimbang Total Unsur yang Terisi	Laporan Hasil Sukma-E
2.	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	Persentase	(Jumlah Pelayanan Yang Terlayani Sesuai Standart Pelayanan / Jumlah Pelayanan Yang Terlayani) x 100%	Laporan Hasil Pelayanan
3.	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Persentase	(Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Yang Ditindaklanjuti / Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi) x 100%	Dokumen Hasil Koordinasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	Nilai SAKIP Kecamatan Ket: Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
5.		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Nilai	Formulasi Perhitungan : (Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran) x 100%	Realisasi Anggaran
6.		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	IP ASN Kecamatan Ket: Kategori Sangat Rendah : =< 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	Nilai IP ASN
7.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Inovasi	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Laporan Pelaksanaan Inovasi

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (periode 2025-2029) memiliki 4 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	Nilai	IKM Kecamatan Ket: Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60 Kategori Baik : 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00 Total dari Nilai Persepsi per Unsur ----- ---- x Nilai Penimbang Total Unsur yang Terisi	Laporan Hasil Sukma-E
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	Nilai SAKIP Kecamatan Ket: Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
3.	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	Persentase	(Jumlah Pelayanan Yang Terlayani Sesuai Standart Pelayanan / Jumlah Pelayanan Yang Terlayani) x 100%	Laporan Hasil Pelayanan
3.	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Persentase	(Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Yang Ditindaklanjuti / Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi) x 100%	Dokumen Hasil Koordinasi

Realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, cenderung mengalami peningkatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel III.2.A
Perbandingan Realisasi Kinerja
(Sesuai dengan Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	N/A	86,11	89,18	91	95,06	95,50	95%

Capaian indikator “IKM Kecamatan” pada sasaran strategis Twujudnya pelayanan publik yang optimal di tahun 2025 adalah sebesar 95,06% angka capaian tersebut didapatkan dari rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) disemester 1 yakni sebesar 92,35 dan nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) disemester 2 yakni sebesar 96,09. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu:

- a. Kualitas pelayanan yang baik , meliputi waktu, prosedur serta persyaratan yang tidak berbelit
- b. Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Ramah
- c. Sarana dan prasarana yang cukup memadai , terdiri dari ruang tunggu yang nyaman, fasilitas yang ramah disabilitas serta system antrian yang tertib
- d. Transparansi serta kepastian layanan

Selain sasaran di Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025) juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	86,91%	100%	100%	100%	-	-
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	N/A	71,19%	100%	100%	100%	-	-
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	A. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,70	78,71	80,93	81,10	83,09	-	-
		B. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	N/A	81%	93%	94%	93%	-	-
		C. Indeks Profesionalitas ASN	N/A	70	79	85	83,06	-	-
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2	2	2	2	2	-	-

1. Capaian indikator “Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan” pada sasaran strategis Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan di tahun 2025 adalah sebesar 100%. Angka capaian tersebut didapatkan dari akumulasi laporan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :
 - A. SOP yang terdokumentasi dan mudah dipahami
 - B. Adanya Budaya kerja yang responsif dan ramah
 - C. Dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelayanan
 - D. Adanya laman pengaduan yang mudah diakses oleh warga
2. Capaian indikator “Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti” pada sasaran strategis Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan di tahun 2025 adalah sebesar 100%. Angka capaian tersebut didapatkan dari dokumen hasil koordinasi yang telah di tindaklanjuti ditahun berjalan. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :
 - A. Adanya penanggungjawab untuk menindaklanjuti setiap koordinasi
 - B. Tidak saling lempar tanggung jawab antar bidang/bagian
 - C. Dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala
3. Capaian indikator “Nilai Sakip Perangkat Daerah” pada sasaran strategis Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di tahun 2025 adalah sebesar 83,09. Angka capaian tersebut didapatkan dari nilai yang ada pada dokumen Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun berjalan. Penilaian AKIP tersebut meliputi penilaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :
 - A. Adanya dokumen perencanaan kinerja yang terukur dan relevan
 - B. Tim SAKIP memahami regulasi dan teknis penyusunan
 - C. Adanya Program/kegiatan yang mendukung langsung pencapaian indicator
 - D. Data capaian indikator valid dan dapat dipertanggungjawabkan
 - E. Tertib Administrasi dan Dokumentasi
4. Capaian indikator “Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah” pada sasaran strategis Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di tahun 2025 adalah sebesar 93%. Angka capaian tersebut didapatkan dari perbandingan capaian anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :

- A. Perencanaan anggaran yang matang
 - B. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan
 - C. Adanya Evaluasi realisasi yang dilakukan secara berkala
 - D. Koordinasi yang baik antar PPTK, bendahara, dan PA
 - E. Kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan
5. Capaian indikator “Indeks Profesionalitas ASN” pada sasaran strategis Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di tahun 2025 adalah sebesar 83,06. Angka capaian tersebut didapatkan dari dokumen Nilai IP ASN. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :
- A. Adanya penilaian kinerja yang Objektif
 - B. Adanya Komitmen Pimpinan dalam Pembinaan ASN
 - C. Penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikan
6. Capaian indikator “Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan” pada sasaran strategis Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah di tahun 2025 adalah sebesar 2 inovasi. Angka capaian tersebut didapatkan dari dokumen laporan inovasi. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :
- A. Adanya penyebaran inovasi kepada ASN dan masyarakat
 - B. Adanya dukungan sumber daya terutama Sarana dan prasarana mendukung
 - C. Dilakukan perbaikan dan penyempurnaan
 - D. Dokumentasi dan Legalitas yang Kuat pada setiap inovasi

Tabel III.2.B
Perbandingan Realisasi Kinerja
(Sesuai dengan Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No	Sasaran Program	Indikator Program	Realisasi	
			2024	2025
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	94,75	95,06
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	82,30	83,09

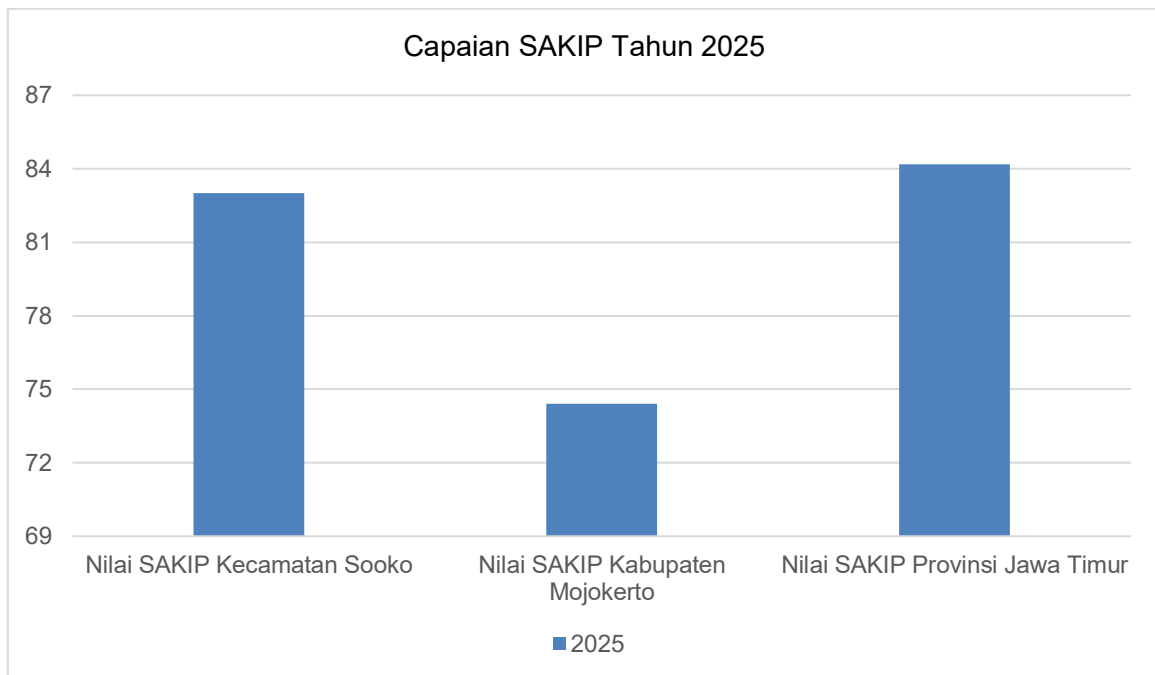
No	Sasaran Program	Indikator Program	Realisasi	
			2024	2025
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	N/A	100%
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	100%	100%

1. Capaian indikator “IKM Kecamatan” pada sasaran strategis Terwujudnya pelayanan publik yang optimal di tahun 2025 adalah sebesar 95,06% angka capaian tersebut didapatkan dari rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) disemester 1 yakni sebesar 92,35 dan nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) disemester 2 yakni sebesar 96,09. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu:
 - a. Kualitas pelayanan yang baik , meliputi waktu, prosedur serta persyaratan yang tidak berbelit
 - b. Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Ramah
 - c. Sarana dan prasarana yang cukup memadai , terdiri dari ruang tunggu yang nyaman, fasilitas yang ramah disabilitas serta system antrian yang tertib
 - d. Transparansi serta kepastian layanan
2. Capaian indikator “Nilai Sakip Perangkat Daerah” pada sasaran strategis Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di tahun 2025 adalah sebesar 83,09. Angka capaian tersebut didapatkan dari nilai yang ada pada dokumen Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun berjalan. Penilaian AKIP tersebut meliputi penilaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :
 - A. Adanya dokumen perencanaan kinerja yang terukur dan relevan
 - B. Tim SAKIP memahami regulasi dan teknis penyusunan
 - C. Adanya Program/kegiatan yang mendukung langsung pencapaian indikator

- D. Data capaian indikator valid dan dapat dipertanggungjawabkan
 - E. Tertib Administrasi dan Dokumentasi
3. Capaian indikator “Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan” pada sasaran strategis Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan di tahun 2025 adalah sebesar 100%. Angka capaian tersebut didapatkan dari akumulasi laporan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :
- A. SOP yang terdokumentasi dan mudah dipahami
 - B. Adanya Budaya kerja yang responsif dan ramah
 - C. Dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelayanan
 - D. Adanya laman pengaduan yang mudah diakses oleh warga
4. Capaian indikator “Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti” pada sasaran strategis Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan di tahun 2025 adalah sebesar 100%. Angka capaian tersebut didapatkan dari dokumen hasil koordinasi yang telah di tindaklanjuti ditahun berjalan. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :
- A. Adanya penanggungjawab untuk menindaklanjuti setiap koordinasi
 - B. Tidak saling lempar tanggung jawab antar bidang/bagian
 - C. Dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala

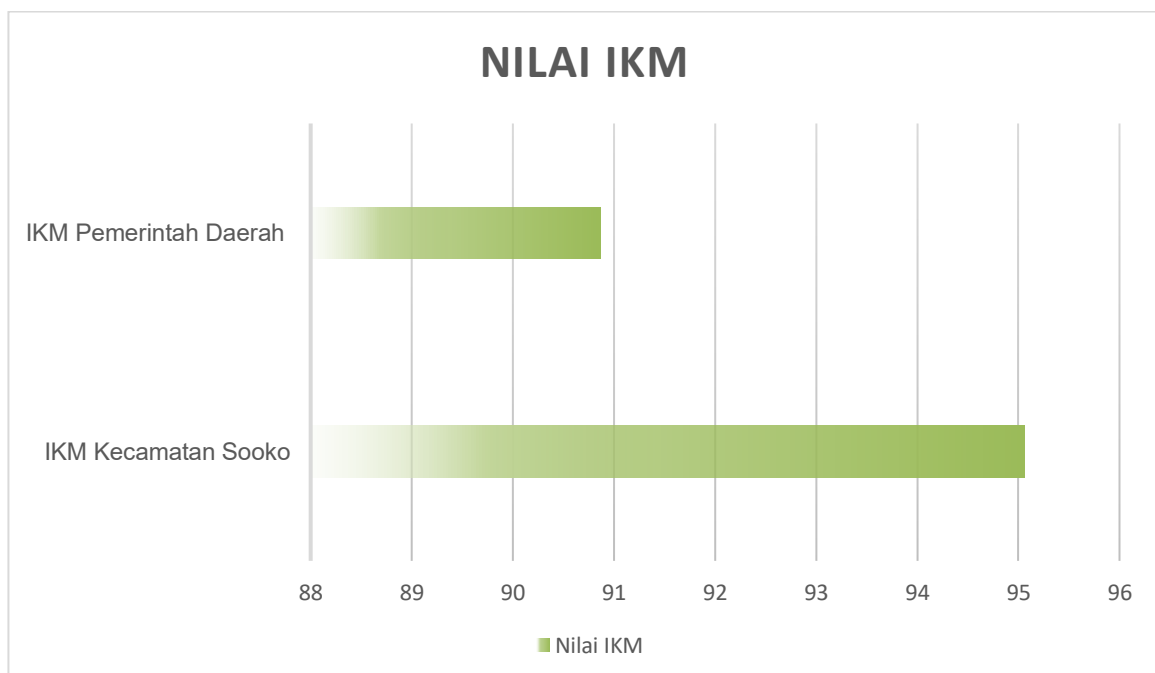
III.3 Prestasi Kinerja Lainnya

Dengan adanya berbagai aplikasi yang ada di Kabupaten Mojokerto, akuntabilitas kinerja di Kabupaten Mojokerto, khususnya Kecamatan Sooko, lebih sistematis, efektif, dan efisien. Dibuktikan dengan nilai hasil evaluasi AKIP Kecamatan Sooko yang mendapatkan predikat A dengan nilai sebesar 83,09. Peningkatan kinerja juga dibuktikan melalui nilai SAKIP Kecamatan Sooko yang lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 82,30. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai SAKIP Kabupaten Mojokerto namun lebih rendah dari nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan rincian, sebagai berikut:



Gambar 2. Grafik Perbandingan Nilai SAKIP

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran, nilai IKM Kecamatan menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IKM Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan dinilai lebih baik oleh masyarakat dibandingkan dengan rata-rata pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan grafik, sebagai berikut:



III.4 Akuntabilitas Anggaran

Anggaran Kecamatan Sooko tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.052.027.000,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 2.845.794.428,00 atau sebesar 93,24% dari total pagu anggaran dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel III.4
Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.608.281.000,00	Rp. 2.455.894.591,00	94,16%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 23.796.000,00	Rp. 21.960.653,00	92,29%
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 419.950.000,00	Rp. 367.939.184,00	87,61%

Berdasarkan capaian program tersebut, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan keuangan, sebagai berikut:

Tabel III.5
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	100%	100%	100%	Rp. 2.608.281.000,00	Rp. 2.455.894.591,00	94,16%
		Persentase Realisasi Anggaran	92%	93,24%	101%			
2	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100%	Rp. 23.796.000,00	Rp. 21.960.653,00	92,29%
3	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	Rp. 419.950.000,00	Rp. 367.939.184,00	87,61%
			Rata-rata capaian		100 %	Total capaian		93,24%

Dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 93,24%, efisiensi kinerja Kecamatan Sooko sebesar 6,76%.

BAB IV

PENUTUP

Capaian kinerja Kecamatan Sooko pada periode pelaporan menunjukkan hasil yang cukup baik, tercermin dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan yang berjalan sesuai dengan rencana serta tingkat pencapaian indikator kinerja yang sebagian besar telah memenuhi target yang ditetapkan. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, fasilitasi pemerintahan desa/kelurahan, serta pelaksanaan koordinasi lintas sektor dapat terlaksana dengan efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan. Begitu pula untuk capaian anggaran, dari pagu anggaran Kecamatan Sooko Tahun 2025 sebesar Rp. 2.512.379.884,00 penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.510.088.486,00 atau 99,91%.

Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek kinerja yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal optimalisasi pelayanan, penguatan kapasitas sumber daya aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, dinamika kebutuhan masyarakat, serta kompleksitas permasalahan wilayah menjadi faktor yang mempengaruhi capaian kinerja secara keseluruhan.

Ke depan, Kecamatan Sooko berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan kinerja secara berkelanjutan melalui perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan kompetensi aparatur, penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait serta pemerintah desa/kelurahan, dan pengembangan inovasi pelayanan publik. Selain itu, upaya penguatan monitoring dan evaluasi, peningkatan disiplin dan akuntabilitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi akan terus dioptimalkan guna mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan kinerja Kecamatan Sooko pada tahun-tahun mendatang dapat semakin meningkat dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Sooko

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025
2. Perjanjian Kinerja P APBD Tahun 2025
3. Tabel E-81 Portal Aksara Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SOOKO
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MASLUCHMAN, S.H., M.Si
Jabatan : CAMAT SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 24 Januari 2025

Pihak Kedua

BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama

CAMAT SOOKO
KABUPATEN MOJOKERTO

MASLUCHMAN, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP 196911191998031005

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SOOKO
KABUPATEN MOJOKERTO**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	95

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5 (A)
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92%
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	84,7 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.788.165.000	APBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 21.200.000	APBD 2025
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 177.254.000	APBD 2025

Mojokerto, 24 Januari 2025

Pihak Kedua

BUPATI MOJOKERTO



dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama

**CAMAT SOOKO
KABUPATEN MOJOKERTO**



MASLUCHMAN, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP 196911191998031005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN SOOKO
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Masluchman, S.H., M.Si.
Jabatan: Camat Sooko Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albarraa
Jabatan: Bupati Mojokerto

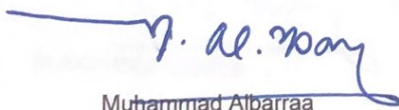
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto


Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Camat Sooko
Kabupaten Mojokerto


Masluchman, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat II / IVb
NIP 196911191998031005

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN SOOKO
KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	95
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	82,50
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.608.281.000	PAPBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 23.796.000	PAPBD 2025
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 419.950.000	PAPBD 2025

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto


Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Camat Sooko
Kabupaten Mojokerto


Masluchman, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I/ IVb
NIP 196911191998031005

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten
Kecamatan Sooko
2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2025)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2026) yang di evaluasi	Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran kas)								Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							I		II		III		IV		I		II		III		IV										
							K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		22	23		24
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R		
1	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal		KM Kecamatan(Indeks)					84.00																							Kecamatan Sooko
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani Sesuai standar pelayanan(%)	250,000,000.00	97,769,403.00	100.00	23,796,000.00	100.00	250,000.00	1,212,900.00	10,800,000.00	11,533,100.00	100.00	420,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	14,471,153.00	0	6,059,500.00	100.00	21,960,653.00		119,730,056.00		47.89				Kecamatan Sooko	
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Ususan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Non Perjinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(pelayanan)	201,275,865.00	97,769,403.00	1,500.00	23,796,000.00	375.00	250,000.00	1,212,900.00	10,800,000.00	11,533,100.00	535.00	420,000.00	518.00	1010000	377.00	14471153	335.00	6,059,500.00	1,765.00	21,960,653.00		119,730,056.00		59.49				Kecamatan Sooko	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Ususan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Ususan Pemerintahan(Laporan)			6.00	23,796,000.00	2.00	250,000.00	1,212,900.00	10,800,000.00	11,533,100.00	2.00	420,000.00	1.00	1,010,000.00	2.00	14,471,153.00	1.00	6,059,500.00	6.00	21,960,653.00								Kecamatan Sooko	
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti (%)	1,900,000,000.00	981,787,284.00	100.00	419,950,000.00	100.00	19,504,700.00	86,144,950.00	122,878,150.00	191,422,200.00	100.00	16,810,000.00	0.00	71,629,689.00	0.00	55,416,932.00	0	224082563	100.00	367,939,184.00		1,349,726,468.00		71.04					Kecamatan Sooko
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa(fasilitas)	1,900,000,000.00	981,787,284.00	23.00	419,950,000.00	6.00	19,504,700.00	86,144,950.00	122,878,150.00	191,422,200.00	6.00	16810000	2.00	71629689	8.00	55416932	7.00	224082563	23.00	367,939,184.00		1,349,726,468.00		71.04					Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)			8.00	21,000,000.00	4.00	1,998,000.00	7,987,000.00	6,325,500.00	4,689,500.00	4.00	1,680,000.00	0.00	5,040,000.00	2.00	8,112,873.00	2.00	5,352,500.00	8.00	20,185,373.00									Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)			5.00	16,450,000.00	2.00	9,626,700.00	1,051,800.00	2,854,700.00	2,916,800.00	2.00	9,250,000.00	0.00	1,010,000.00	2.00	4,414,370.00	1.00	1,307,000.00	5.00	15,981,370.00									Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)			5.00	300,000,000.00	0.00	3,700,000.00	15,430,100.00	101,752,500.00	179,117,400.00	0.00	5,880,000.00	0.00	6,890,000.00	2.00	37,273,126.00	3.00	204,453,997.00	5.00	254,497,123.00									Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)			5.00	82,500,000.00	0.00	4,180,000.00	61,676,050.00	11,945,450.00	4,698,500.00	0.00	0.00	2.00	58,689,689.00	2.00	5,616,563.00	1.00	12,969,066.00	5.00	77,275,318.00									Kecamatan Sooko
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program(%)	17,613,002,685.00	10,120,227,973.00	85.00	2,608,281,000.00	20.00	1,191,963,539.00	663,753,442.00	666,292,370.00	86,271,649.00	25.00	584,189,931.00	25.00	690,308,283.00	25.00	558,147,103.00	25	623249274	100.00	2,455,894,591.00		12,576,122,564.00		71.40					Kecamatan Sooko
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi(%)	92,000,000.00	53,202,800.00	100.00	11,600,000.00	25.00	575,000.00	3,756,800.00	5,592,400.00	1,675,800.00	25.00	2850000	31.00	326500	24.00	6968000	20.00	1276000	100.00	11,420,500.00		64,623,300.00		70.24					Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)			4.00	7,500,000.00	1.00	125,000.00	3,606,600.00	2,425,000.00	1,343,400.00	1.00	2,334,500.00	1.00	242,500.00	2.00	4,286,840.00	0.00	486,000.00	4.00	7,349,840.00									Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			21.00	4,100,000.00	7.00	450,000.00	150,200.00	3,167,400.00	332,400.00	7.00	515,500.00	4.00	84,000.00	6.00	2,681,160.00	4.00	790,000.00	21.00	4,070,660.00									Kecamatan Sooko
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(laporan)	15,898,293,325.00	8,916,918,269.00	1.00	2,335,427,000.00	1.00	1,151,819,499.00	586,259,751.00	581,453,750.00	15,894,000.00	1.00	545334079	0.00	629229419	0.00	481228366	0.00	555524395	1.00	2,211,316,259.00		11,128,234,528.00		70.00					Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			20.00	2,335,427,000.00	0.00	1,151,819,499.00	586,259,751.00	581,453,750.00	15,894,000.00	20.00	545,334,079.00	0.00	629,229,419.00	0.00	481,228,366.00	0.00	555,524,395.00	20.00	2,211,316,259.00									Kecamatan Sooko
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)	852,500,000.00	511,345,599.00	92.00	107,840,000.00	23.00	11,601,800.00	33,936,275.00	29,830,100.00	32,471,825.00	25.00	11065126	25.00	33820699	25.00	39812548	17.00	15330126	92.00	100,028,499.00		611,374,098.00		71.72					Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)			1.00	7,500,000.00	0.00	2,502,000.00	7,750.00	2,502,000.00	2,488,250.00	1.00	2,046,000.00	0.00	440,000.00	0.00	4,915,080.00	0.00	0.00	1.00	7,401,080.00									Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			2.00	12,350,000.00	0.00	0.00	12,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	11,843,700.00	0.00	0.00	0.00	2.00	11,843,700.00									Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			12.00	60,000,000.00	3.00	6,434,000.00	13,407,600.00	17,902,300.00	22,256,100.00	3.00	2,320,000.00	3.00	17,460,000.00	3.00	20,345,000.00	3.00	13,041,500.00	12.00	53,166,500.00									Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			1.00	5,000,000.00	0.00	1,204,500.00	1,105,600.00	1,829,600.00	860,300.00	0.00	1,523,126.00	1.00	886,999.00	0.00	1,527,563.00	0.00	1,035,626.00	1.00	4,973,314.00									Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)			12.00	2,246,000.00	3.00	561,300.00	562,100.00	561,300.00	561,300.00	3.00	540,000.00	3.00	540,000.00	3.00	540,000.00	3.00	540,000.00	12.00	2,160,000.00									Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			1.00	15,644,000.00	0.00	0.00	5,003,225.00	5,234,900.00	5,405,875.00	0.00	3,836,000.00	1.00	1,050,000.00	0.00	10,084,905.00	0.00	613,000.00	1.00	15,583,905.00									Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			12.00	5,100,000.00	3.00	900,000.00	1,500,000.00	1,800,000.00	900,000.00	3.00	800,000.00	3.00	1,600,000.00	3.00	2,400,000.00	3.00	100,000.00	12.00	4,900,000.00									Kecamatan Sooko
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)	394,350,000.00	282,957,495.00	100.00	81,414,000.00	25.00	21,702,240.00	19,660,266.00	19,851,120.00	20,200,374.00	25.00	16173726	25.00	17811665	25.00	15723189	25.00	19255603	100.00	68,964,183.00		351,921,678.00		89.24					Kecamatan Sooko
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)			12.00	45,350,000.00	3.00	10,500,000.00	10,500,746.00	12,000,000.00	12,349,254.00	3.00	7,205,566.00	3.00	6,609,425.00	3.00	7,872,069.00	3.00	11,404,483.00	12.00	33,091,543.00						</			

[illegible]